

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Peraturan Presiden ini mewajibkan setiap Kepala OPD untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penetapan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang Tahun 2019 serta pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran yang dikelolanya. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2019, maka BAPPEDA Kota Padang Panjang berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam DPA Tahun 2019.

LKjIP BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2019 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program dan kegiatan yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome yang telah ditetapkan dan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2019.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan LKjIP BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah memberikan informasi yang akuntabel dan transparan mengenai pertanggungjawaban keberhasilan BAPPEDA Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pencapaian dari penetapan kinerja pada tahun 2019, yang dilaksanakan melalui kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2019.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai perwujudan akutabilitas BAPPEDA Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 29 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, maka Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) melaksanakan tugas penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan. Adapun fungsi BAPPEDA adalah sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah;
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

D. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
 - b. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
 - c. Sub Bidang Data dan Informasi Pembangunan.
4. Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya; dan
 - c. Sub Bidang Pemerintahan.
5. Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - c. Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Teknologi dan Inovasi Daerah;
 - b. Sub Bidang Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
 - c. Sub Bidang Pengkajian Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur.
7. UPT; dan
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, BAPPEDA Kota Padang Panjang didukung oleh (Empat puluh dua) orang personil yang terdiri 9 orang Golongan IV, 18 orang Golongan III, 5 orang Golongan II, 1 orang Golongan I dan 9 orang tenaga harian lepas.

E. Sistematika Penyusunan LKjIP

LKjIP BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2019 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Tugas Pokok dan Fungsi

- D. Susunan Organisasi
- E. Sistematika Penyusunan LAKIP

Bab II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- A. Tujuan dan Sasaran
- B. Penetapan Kinerja Tahun 2019

Bab III : AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran
- C. Review dengan Capaian Tahun Lalu

Bab IV : PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran

Dalam upaya mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah terpilih, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi Kepala Daerah terpilih selama kurun waktu lima tahun ke depan.

Tujuan pembangunan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Predikat sistem akuntabilitas kinerja pemerintah	B (60,1)	BB (65)	BB (70,1)	BB (75)	A (80,02)
		Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	70 %	74 %	78 %	82 %	85 %

Strategi dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran

Setelah ditetapkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan juga strategi dan kebijakan yang akan digunakan untuk mencapai target yang akan dituangkan dalam program dan kegiatan, sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang ekonomi sumber daya alam dan infrastruktur
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian bidang Pembangunan manusia, sosial budaya pemerintahan	Meningkatkan kualitas perencanaan bidang Pembangunan manusia, sosial budaya pemerintahan
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program bidang Pembangunan manusia, sosial budaya pemerintahan
		Peningkatan perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah
			Meningkatkan pengendalian pelaksanaan program pembangunan daerah
			Meningkatkan kualitas data pembangunan daerah
		Peningkatan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dalam kebijakan daerah	Peningkatan pelaksanaan, Program yang berkaitan dengan isu-isu aktual program strategis Pemerintah Daerah
			Membangun jejaring kerjasama kelembagaan dengan stakeholders terkait

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Sesuai dengan penetapan Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 yang ditandatangani oleh Walikota dan Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, target capaian kinerja yaitu :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**

No	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2019
1	2	3	4
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	70 %

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Tupoksi BAPPEDA Kota Padang Panjang seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya dan sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2019, maka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan seluruh program kegiatan pada BAPPEDA Kota Padang Panjang dicapai dengan sasaran yakni :

Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah

Target evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah dengan indikator kinerja sasaran yakni, persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah untuk tahun 2019 ditargetkan sebesar 70%.

No	Indikator Sasaran	Tahun 2019		
		Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1.	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	70%	72,35%	103,36%

Capaian indikator kinerja sasaran tahun 2019 sebesar 103,36% dengan predikat ***sangat berhasil***. Pencapaian indikator kinerja persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah tahun 2019 adalah 72,35%. Capaian ini sangat bagus melebihi target yang telah ditetapkan untuk tahun 2019 sebesar 70% yang ditetapkan dalam Rencana BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023.

Adapun cara perhitungan indikator sasaran daerah tersebut adalah ditetapkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) BAPPEDA Kota Padang Panjang, yakni :

$$= \frac{\sum \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \right)}{\text{Jumlah Indikator}}$$

Ket : Jumlah persentase capaian indikator sasaran daerah terhadap target tahun ke -n / jumlah indikator sasaran daerah

**CAPAIAN KINERJA SASARAN DAERAH PADA PEMERINTAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2019**

NO	MISI/TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	NO	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
I.	MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI UNGGULAN DAERAH BERBASIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN					
T1.	Meningkatnya Perekonomian Daerah Yang Berkelanjutan	1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5.96	5.59	93.79
S1	Meningkatnya daya saing ekonomi unggulan daerah yang tangguh berbasis ekonomi kerakyatan	1.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3.05	3.67	120,33
		1.2	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	5.02	5.28	105.17
		1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri	2.28	(2.74)	(120,17)
		1.4	Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.61	7.23	95,01
S2.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan	1.2.1	Persentase Kenaikan Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur	0.50	-	-

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.2	IKLH	65.25-55.57	64,77	98,27
T2	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	2.	PDRB Perkapita	48.19	64.75	134.36
S3.	Menurunnya Angka Kemiskinan dan Kesenjangan	2.3.1	Angka Kemiskinan	5.45	5.60	97.25
		2.3.2	Indeks Gini	0.28	0.322	85
S4.	Menurunnya Angka Pengangguran	2.4.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.84	4.35	110.12
S5.	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	2.5.1	Pengeluaran Perkapita (Daya Beli Masyarakat)	10.29	11.013	107.03
II.	MENINGKATKAN PEMERATAAN KUALITAS DAYA SAING SDM MASYARAKAT YANG BERAKHLAK DAN BERBUDAYA					
T3	Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Daya Saing SDM Yang Sehat, Berakhlak dan Unggul	3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	78.25	78.00	99.68
S6	Meningkatnya Pemerataan Kualitas Daya Saing Pendidikan	3.6.1	Rata-Rata Lama Sekolah	11,88	11,45	96,39
		3.6.2	Harapan Lama Sekolah	15,27	15,05	98,56
S7	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	3.7.1	Angka Harapan Hidup	72,47	72,77	100,41
T4.	Terwujudnya Tataan Kehidupan Sosial Masyarakat Yang Tentram dan Agamais	4.	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96.37	100	103,76
S8	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum	4.8.1	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum	96.37	100	103,76

1	2	3	4	5	6	7
S9	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial	4.9.1	Persentase Penurunan Jumlah PMKS	2.34	10,42	445,29
S10.	Meningkatnya aktivitas keagamaan dimasyarakat	4.10.1	Persentase aktivitas kegiatan keagamaan di masjid	38.82	46,04	118,59
III	MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG RESPONSIF, INOVATIF DAN PARTISIPATIF					
T5	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih	5	Indeks Reformasi Birokrasi	62	63,49	102,40
S11	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	5.11.1	Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	B(60,1)	B (60,64)	100
		5.11.2	Opini BPK	WTP	WTP	100
S12	Terselenggaranya pelayanan publik yang berkualitas dan melayani	5.12.1	Indeks Kepuasan Masyarakat	78 (Baik)	85,76 (Baik)	109,95
T6	Meningkatnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan	6	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan	2,30	2,01	87,75
S 13	Meningkatnya peran serta kelompok/lembaga kemasyarakatan dalam pembangunan	5.13.1	Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif	70	100	142,86
S14	Meningkatnya Pemberdayaan Gender	5.14.1	Indeks Pemberdayaan Gender	77.50	74,45	96,06

Untuk mendukung pencapaian sasaran dilaksanakan melalui 11 (sebelas) Program dengan 50 (lima puluh) Kegiatan yang ada pada BAPPEDA Kota Padang Panjang dengan anggaran yang disediakan dalam APBD Tahun 2019 sebesar Rp.3.902.395.297,- dengan realisasi Rp.3.338.558.932,- atau 85,55%.

B. Realisasi Anggaran

Untuk melihat capaian realisasi keuangan maka ada beberapa sasaran strategis yang dapat di rangkum dan dijadikan sebagai ukuran, yaitu :

No	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/ KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	Program Pengembangan data/ informasi	71.650.000	67.890.150	
		Pengelolaan Sistem Informasi Pembangunan Daerah	8.250.000	4.946.500	59,96 %
		Sistem Informasi Manajemen Perencanaan	63.400.000	51.609.470	81,40 %
		Program Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	104.426.800	67.890.150	
		Fasilitasi Pelaksanaan SATIMISAKE	17.124.900	8.006.150	46,75 %
		Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan dan Sanitasi	38.299.900	20.191.950	52,72 %
		Review RPI2JM	9.100.000	5.336.000	58,64 %
		Pengembangan dan updating GIS	39.902.000	34.356.050	86,10 %
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	616.760.797	541.614.211	
		Pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah	27.415.800	27.413.500	99,99 %
		Penyusunan RKPD	21.149.900	20.676.050	97,76 %
		Pelaksanaan Musrenbang RKPD	56.371.000	56.339.500	99,94 %
		Musrenbang RPJMD	65.770.000	53.608.500	81,51 %
		Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah	8.400.000	5.077.000	60,44 %
		Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan RKPD	47.580.000	35.217.400	74,02 %

1	2	3	4	5	6
		Peningkatan Kapasitas Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan	16.499.800	15.018.850	91,02 %
		Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan	22.999.900	22.995.800	99,98 %
		Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan yang didanai APBN	38.887.500	33.347.757	85,75 %
		Fasilitasi penyusunan Renja dan Renstra Perangkat Daerah	115.479.900	93.266.650	80,76 %
		Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD	196.206.997	178.653.204	91,05 %
		Program Perencanaan Bidang Ekonomi	10.144.800	8.327.300	
		Koordinasi Pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (TKPP)	10.144.800	8.327.300	82,08 %
		Program Perencanaan Sosial Budaya	243.696.000	208.006.650	
		Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	81.650.000	50.058.550	61,31 %
		Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan PUG	38.104.800	35.834.750	94,04 %
		Pembinaan Forum Kota Sehat	13.995.500	12.700.600	90,75 %
		Investigasi Usulan Kegiatan Pembangunan	109.945.700	109.412.750	99,52 %
		Program Penelitian dan Pengembangan	1.502.905.000	1.86.122.543	
		Penelitian dan kajian masalah Sosial	133.500.000	111.735.300	83,70 %
		Penelitian dan kajian ekonomi dan Infrastruktur	198.750.000	144.248.213	72,58 %
		Diskusi Aktual Pembangunan Daerah	57.925.000	33.166.750	57,26 %
		Penguatan peran pelaku kelitbangan Daerah	328.900.000	236.921.205	72,03 %
		Survey, Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Strategis	124.950.000	108.378.750	86,74 %
		Kajian Kota Ramah Disabilitas	99.850.000	78.851.650	78,97 %
		Kajian Pembangunan Sport Centre	77.600.000	59.686.475	76,92 %
		Kajian Peluang dan Potensi industri kapur	161.630.000	140.887.450	87,17 %
		Kajian Pengelolaan Sampah	99.000.00	76.143.550	76,91 %
		Kajian transportasi darat	220.800.000	196.103.200	88,81 %

1	2	3	4	5	6
		Penguatan Inovasi Daerah	76.429.800	67.922.000	
		Penguatan Sistem dan jejaring Inovasi Daerah	76.429.800	67.922.000	88,87 %

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2019 adalah sebesar 85,55%.

C. Review dengan Capaian Tahun Lalu

Capaian kinerja tahun 2018 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2018		
			Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase konsistensi dokumen RPJMD ke dalam RKPD	75 %	75 %	100 %
		Persentase konsistensi dokumen RKPD ke dalam APBD	70 %	70 %	100 %
		Persentase usulan Musrenbang Kecamatan yang terakomodir dalam APBD	70 %	70 %	100 %
2.	Mewujudkan hasil penelitian dan pengembangan yang inovatif dalam kebijakan daerah	Persentase hasil penelitian/kajian dalam perumusan kebijakan daerah	20 %	30 %	150 %

Sasaran dan indikator kinerja pada BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2018 berbeda dengan Tahun 2019, hal ini di karena kita telah menetapkan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2018-2023 pada tahun 2019. Secara keseluruhan tahun 2018 realisasi indikator kinerja sebesar 125%. Dan untuk realisasi keuangan Tahun 2018 adalah Rp.3.816.698.139,- (87,91%) dengan total anggaran Rp.4.341.712.886.

BAB IV

PENUTUP

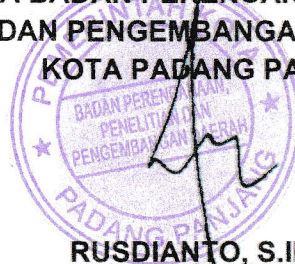
A. Kesimpulan

Secara kuantitatif, kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang tahun 2019 telah dilaksanakan dengan baik, dengan capaian kinerja secara keseluruhan mencapai 99,94%. Sedangkan capaian kinerja keuangan mencapai 85,55%. Dari sisi keuangan, hal ini mengindikasikan terjadinya efisiensi dari pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan.

B. Saran

Dalam rangka menerapkan prinsip *Good Governance*, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, masih sangat diperlukan komitmen bersama dari seluruh *stakeholders*, khususnya konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan sebagaimana telah direncanakan dan disusun serta dituangkan dalam dokumen perencanaan, sehingga capaian kinerja kegiatan dapat diukur keberhasilannya.

Padang Panjang, 28 Januari 2020
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**


RUSDianto, S.IP MM.

Pembina Utama Muda/NIP. 19640402 198602 1 003